**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21881-21889

# PERENCANAAN SDM PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KOMPETENSI DAN NILAI-NILAI QUR'ANI DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: STUDI KUALITATIF DI SEKOLAH ISLAM TERPADU

**Siti Sumartini[1], Else Meina[2], Yulia Tri Samiha[3], Leny Marlina[4]**

[1,2,3,4] **Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

E-mail: sitisumartini_25052170030@radenfatah.ac.id[1], elsemeina_25052170002@radenfatah.ac.id[2], yuliatrisamiha_uin@radenfatah.ac.id[3], lenymarlina_uin@radenfatah.ac.id[4]

Published: April , 2026

## ABSTRAK

Perencanaan sumber daya manusia (SDM) dalam pendidikan Islam masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan kompetensi profesional dengan internalisasi nilai-nilai Qur'ani. Banyak lembaga pendidikan Islam belum memiliki sistem perencanaan SDM yang terstruktur dan selaras dengan visi keislaman, sehingga mutu lembaga belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya model perencanaan SDM yang memadukan pendekatan manajerial modern dan nilai-nilai Islam secara sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan SDM pendidikan Islam berbasis kompetensi dan nilai-nilai Qur'ani dalam meningkatkan mutu lembaga pada Sekolah Islam Terpadu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan SDM yang efektif meliputi pemetaan kompetensi pendidik, integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam rekrutmen dan pembinaan, serta evaluasi kinerja berbasis profesionalisme dan akhlak. Implementasi model ini berdampak pada peningkatan kinerja guru dan mutu lembaga secara berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa model perencanaan SDM pendidikan Islam yang integratif dan aplikatif bagi penguatan mutu lembaga pendidikan Islam.

**Kata kunci:** Perencanaan SDM, Pendidikan Islam, Kompetensi, Nilai Qur'ani, Mutu Lembaga.

## ABSTRACT

Human resource (HR) planning in Islamic education continues to face challenges in integrating professional competencies with the internalization of Qur'anic values. Many Islamic educational institutions have not yet developed structured and vision-aligned HR planning systems, resulting in suboptimal institutional quality. This condition highlights the need for an HR planning model that systematically integrates modern managerial approaches with Islamic values.

This study aims to analyze competency-based and Qur'anic values-based HR planning in improving institutional quality at an Integrated Islamic School. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using an interactive model involving data reduction, data display, and condusion drawing through triangulation techniques.

The findings reveal that effective HR planning indudes systematic competency mapping of educators, integration of Qur'anic values in recruitment and professional development processes, and performance evaluation based on professionalism and moral integrity. The implementation of this model contributes to improved teacher performance and sustainable institutional quality.

This study offers an integrative and applicable HR planning model for strengthening the quality of Islamic educational institutions.

**Keywords:** Human Resource Planning, Islamic Education, Competency, Qur'anic Values, Institutional Quality.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

# PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor strategis dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Dalam perspektif manajemen modern, SDM tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai aset utama (human capital) yang menentukan daya saing dan kualitas organisasi. Teori manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Gary Dessler menegaskan bahwa perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk memastikan organisasi memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat guna mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dalam konteks pendidikan, kualitas guru dan tenaga kependidikan menjadi determinan utama mutu pembelajaran dan reputasi lembaga. (Nata A. , 2022)

Dalam pendidikan Islam, perencanaan SDM tidak hanya berorientasi pada kompetensi profesional, tetapi juga pada pembentukan karakter dan integritas spiritual. Konsep pendidikan Islam menekankan integrasi antara ilmu dan amal, sebagaimana dijelaskan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan insan beradab (insan adabi) yang berilmu dan berakhlak. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan SDM pendidikan Islam seharusnya mengintegrasikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dengan nilai-nilai Qur'ani sebagai landasan etik dan spiritual.

Namun demikian, secara kontekstual, lembaga pendidikan Islam saat ini menghadapi tantangan yang kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta tuntutan akuntabilitas publik mendorong lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Di sisi lain, masih ditemukan praktik perencanaan SDM yang bersifat administratif dan belum berbasis analisis kebutuhan kompetensi secara komprehensif. Rekrutmen tenaga pendidik sering kali belum disertai pemetaan kompetensi yang terukur, pembinaan belum terprogram secara sistematis, dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dengan indikator mutu lembaga. (Qomar, 2007)

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep manajemen SDM modern dan praktik pengelolaan SDM di lembaga pendidikan Islam. Dalam banyak kasus, nilai-nilai Qur'ani hanya menjadi simbol normatif, belum terinternalisasi dalam sistem perencanaan SDM secara operasional. Padahal, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan manusia seperti amanah (QS. Al-Anfal: 27), profesionalitas (QS. Al-Qashash: 26), dan musyawarah (QS. Asy-Syura: 38) yang relevan dengan tata kelola SDM.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji manajemen SDM dalam pendidikan Islam. Studi yang dilakukan oleh Mujamil Qomar menekankan pentingnya reformulasi manajemen pendidikan Islam agar adaptif terhadap perubahan sosial. Penelitian lain oleh Abuddin Nata menunjukkan bahwa mutu pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dan profesionalisme guru. Sementara itu, kajian manajemen strategis dalam pendidikan oleh Fred R. David menekankan bahwa perencanaan strategis SDM harus berbasis analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. (Freed, 2017)

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas manajemen pendidikan Islam secara umum dan belum secara spesifik mengintegrasikan pendekatan berbasis kompetensi dengan internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam kerangka perencanaan SDM yang sistematis. Penelitian yang mengkaji integrasi dua pendekatan tersebut yakni manajerial modern dan nilai normatif Islam—masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Sekolah Islam Terpadu yang memiliki karakteristik kelembagaan khas: integrasi kurikulum umum dan diniyah, budaya islami, serta orientasi mutu berbasis kepercayaan masyarakat.

Kesenjangan inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini. Dibutuhkan model konseptual dan praktis perencanaan SDM pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian standar kompetensi guru sebagaimana diatur dalam regulasi nasional, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani sebagai fondasi etis dan spiritual dalam setiap tahapan perencanaan, mulai dari analisis kebutuhan, rekrutmen, seleksi, pembinaan, hingga evaluasi kinerja.

Secara teoretis, pendekatan berbasis kompetensi berakar pada teori kompetensi yang dikembangkan oleh David McClelland yang menekankan bahwa kinerja unggul ditentukan oleh karakteristik kompetensi individu, bukan sekadar kecerdasan akademik. Dalam konteks pendidikan Islam, kompetensi tersebut perlu diperluas dengan dimensi spiritual dan moral sebagai bagian integral dari profesionalitas. Integrasi ini sejalan dengan paradigma tauhid yang memandang seluruh aktivitas manajerial sebagai bagian dari ibadah dan amanah. (McClelland, 1973)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perencanaan SDM pendidikan Islam berbasis kompetensi dan nilai-nilai Qur'ani dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam pada Sekolah Islam Terpadu. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi: (1) bagaimana proses perencanaan SDM dilakukan, (2) bagaimana nilai-nilai Qur'ani diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan, dan (3) bagaimana implikasinya terhadap peningkatan mutu lembaga.

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi penting. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah manajemen pendidikan Islam dengan menawarkan sintesis antara teori kompetensi modern dan nilai-nilai Qur'ani dalam kerangka perencanaan SDM. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan model aplikatif yang dapat dijadikan rujukan oleh pengelola lembaga pendidikan Islam dalam merancang sistem perencanaan SDM yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Ketiga, secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan standar mutu internal lembaga pendidikan Islam yang berbasis nilai dan profesionalitas.

Dengan demikian, perencanaan SDM pendidikan Islam tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas administratif, melainkan sebagai proses strategis yang menentukan arah dan kualitas lembaga. Integrasi antara kompetensi dan nilai-nilai Qur'ani menjadi fondasi penting dalam mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang unggul, berdaya saing, dan tetap berakar pada prinsip-prinsip keislaman.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian mengenai perencanaan sumber daya manusia (SDM) pendidikan Islam berbasis kompetensi dan nilai-nilai Qur'ani menuntut analisis yang bersifat interpretatif, konseptual, dan kontekstual. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, makna, dan konstruksi manajerial dalam konteks pendidikan Islam, bukan pada pengukuran kuantitatif. (Creswell, 2018) Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah bagaimana perencanaan SDM yang berbasis kompetensi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Qur'ani serta implikasinya terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan multi-situs terbatas pada beberapa lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem manajemen berbasis nilai. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik perencanaan SDM tanpa terikat pada satu institusi tertentu. (Sugiyono, 2022) Fokus penelitian diarahkan pada tahapan perencanaan SDM yang meliputi analisis kebutuhan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Qur'ani.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan lembaga, pengelola bidang SDM, dan pendidik yang terlibat dalam proses perencanaan SDM. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai standar kompetensi, strategi pengembangan profesional, serta internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam praktik manajemen SDM. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat implementasi budaya kerja islami dan profesional di lingkungan lembaga pendidikan.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga, seperti rencana strategis, standar operasional prosedur (SOP), pedoman rekrutmen, program pembinaan guru, serta instrumen evaluasi kinerja. Literatur akademik yang relevan juga digunakan untuk memperkuat analisis teoritis mengenai kompetensi, manajemen SDM, dan mutu lembaga pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai kebijakan dan praktik perencanaan SDM. Observasi dilakukan untuk mengamati kesesuaian antara kebijakan dan

implementasi di lapangan. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data tertulis yang mendukung dan memverifikasi informasi hasil wawancara dan observasi. Penggunaan ketiga teknik ini memungkinkan dilakukannya triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan tema utama, yaitu kompetensi, nilai-nilai Qur'ani, dan mutu lembaga. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses reflektif dan verifikasi berulang untuk menemukan pola hubungan antara perencanaan SDM berbasis kompetensi dan peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan *member check* untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan model konseptual dan praktis mengenai perencanaan SDM pendidikan Islam berbasis kompetensi dan nilai-nilai Qur'ani yang relevan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam secara berkelanjutan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Pendidikan sebagai Produk Politik

Pendidikan pada dasarnya tidak pernah berdiri dalam ruang hampa. Ia selalu berada dalam konteks sosial, ideologis, dan politik yang membentuk arah serta orientasinya. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang lahir melalui proses politik, sehingga keputusan-keputusan di bidang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan negara, distribusi kekuasaan, serta pilihan nilai yang dianut oleh pemerintah. Dalam perspektif kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Riant Nugroho, setiap kebijakan mencerminkan preferensi nilai, prioritas pembangunan, serta kompromi antara berbagai kepentingan yang beroperasi dalam sistem politik.

Dalam konteks pendidikan nasional, kebijakan tidak hanya berfungsi mengatur proses pembelajaran, tetapi juga membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat. Pendidikan menjadi instrumen strategis negara dalam membangun identitas nasional, menanamkan nilai ideologis, dan mengarahkan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dipahami sekadar sebagai regulasi teknis, melainkan sebagai bagian dari dinamika politik pendidikan yang lebih luas. (Nugroho, 2008)

H.A.R. Tilaar menegaskan bahwa pendidikan selalu berada dalam pusaran kekuasaan. Negara memiliki otoritas untuk menentukan arah sistem pendidikan, termasuk kurikulum, kelembagaan, dan standar mutu. Dalam kerangka ini, posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia mencerminkan relasi antara negara dan aspirasi keagamaan masyarakat. Kebijakan yang mengatur pendidikan Islam bukan hanya persoalan pedagogis, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara mengelola keberagaman serta mengakomodasi identitas religius dalam struktur politik nasional. (Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural, 2003)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan ranah yang tidak pernah terlepas dari konteks sosial, ideologis, dan politik. Kebijakan pendidikan pada hakikatnya adalah bagian dari kebijakan publik yang lahir melalui proses politik, sehingga senantiasa mencerminkan pilihan nilai, kepentingan negara, serta dinamika kekuasaan yang berkembang dalam suatu sistem pemerintahan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme akademik, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam membentuk tatanan sosial, identitas nasional, dan orientasi pembangunan sumber daya manusia.

Dalam kerangka ini, kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai regulasi teknis atau pedagogis, melainkan sebagai bagian integral dari politik pendidikan nasional. Posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia merepresentasikan relasi antara negara dan aspirasi keagamaan masyarakat, sekaligus mencerminkan bagaimana negara mengelola keberagaman dan mengakomodasi dimensi religius dalam kebijakan publik. Dengan demikian,

pendidikan Islam bukan hanya entitas pendidikan, tetapi juga fenomena kebijakan yang memiliki dimensi sosial dan politik yang signifikan.

**Akar Historis Dualisme Pendidikan di Indonesia**

Dualisme pendidikan di Indonesia memiliki akar historis yang panjang. Pada masa kolonial, sistem pendidikan modern Barat berkembang terpisah dari lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren. Pendidikan kolonial dirancang untuk memenuhi kebutuhan administratif dan birokratis pemerintah kolonial, dengan orientasi rasionalitas, sekularisasi, dan modernisasi. Sementara itu, pesantren dan madrasah mempertahankan sistem pendidikan berbasis keagamaan yang menekankan transmisi ilmu-ilmu Islam, pembinaan moral, dan pembentukan karakter religius.

Karel A. Steenbrink menjelaskan bahwa pembelahan ini tidak sekadar bersifat teknis, tetapi mencerminkan benturan paradigma pendidikan. Pendidikan kolonial membawa model institusional modern, sedangkan pendidikan Islam tradisional berakar pada sistem kultural dan religius yang berbeda. Setelah kemerdekaan, struktur dualisme tersebut tidak sepenuhnya dihapus. Negara justru menginstitusionalisasikan pemisahan ini melalui kebijakan formal, di mana pendidikan umum dan pendidikan keagamaan berada dalam kewenangan birokrasi yang berbeda. (Steenbrink, 1986)

Azyumardi Azra menegaskan bahwa integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem nasional merupakan proses politik dan historis yang kompleks. Madrasah dan pesantren diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi tetap dikelola dalam struktur kelembagaan tersendiri. Kondisi ini mencerminkan kompromi negara dalam mengakomodasi realitas sosial masyarakat Indonesia yang religius sekaligus pluralistik. (Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III, 1999)

Dengan demikian, dualisme pendidikan di Indonesia bukan fenomena kebetulan, melainkan hasil konstruksi sejarah, dinamika politik, serta negosiasi ideologis yang panjang. Pemisahan kelembagaan mencerminkan strategi negara dalam menyeimbangkan modernisasi pendidikan dengan aspirasi keagamaan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan mengenai dualisme pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa struktur dualistik dalam sistem pendidikan nasional memiliki akar historis yang kuat dan tidak dapat dipahami sebagai fenomena administratif semata. Dualisme tersebut lahir dari proses sejarah yang panjang sejak masa kolonial, ketika pendidikan modern Barat berkembang terpisah dari lembaga pendidikan Islam tradisional. Pemisahan ini mencerminkan perbedaan paradigma pendidikan, di mana sistem kolonial menekankan rasionalitas dan modernisasi, sementara pendidikan Islam berorientasi pada pembinaan moral dan nilai-nilai keagamaan.

Pasca kemerdekaan, dualisme pendidikan tidak sepenuhnya dihapus, melainkan mengalami institusionalisasi melalui kebijakan negara. Pengakuan terhadap madrasah dan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional menunjukkan adanya akomodasi negara terhadap aspirasi keagamaan masyarakat. Namun, pengelolaan yang tetap berada dalam struktur kelembagaan tersendiri memperlihatkan bahwa integrasi pendidikan Islam berlangsung dalam kerangka kompromi politik dan ideologis.

Dengan demikian, dualisme pendidikan di Indonesia merupakan hasil konstruksi sejarah, dinamika politik, dan negosiasi ideologis yang kompleks. Pemisahan kelembagaan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan strategi negara dalam menyeimbangkan tuntutan modernisasi pendidikan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang religius dan pluralistik.

**Dualisme Kelembagaan sebagai Fenomena Politik Pendidikan**

Secara formal, dualisme kelembagaan sering dipahami sebagai pembagian administratif untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. Pendidikan umum dikelola oleh kementerian yang membidangi pendidikan, sementara pendidikan Islam berada di bawah kementerian agama. Namun, dalam perspektif politik pendidikan, dualisme ini memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks.

Robert W. Hefner menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan di negara-negara Muslim sering kali menjadi arena negosiasi antara modernisasi negara dan identitas religius. Negara harus merespons tuntutan pembangunan nasional sekaligus aspirasi keagamaan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dualisme kelembagaan mencerminkan kompromi tersebut. Negara berupaya mempertahankan stabilitas sosial dengan memberikan ruang bagi pendidikan agama, tetapi tetap menjaga struktur pendidikan modern. (Hefner, 2000)

Dualisme ini pada akhirnya membentuk konfigurasi kebijakan yang unik. Pendidikan Islam tidak sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan nasional, tetapi juga tidak berada di luar sistem negara. Posisi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki legitimasi formal, tetapi tetap menghadapi tantangan struktural dalam koordinasi kebijakan, standarisasi mutu, dan distribusi sumber daya.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dualisme kelembagaan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembagian administratif untuk kepentingan efektivitas birokrasi. Dualisme tersebut memiliki dimensi politik yang lebih mendalam, karena berkaitan dengan cara negara mengelola relasi antara modernisasi pendidikan dan aspirasi religius masyarakat. Struktur kelembagaan yang memisahkan pengelolaan pendidikan umum dan pendidikan Islam mencerminkan bentuk kompromi kebijakan negara dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan identitas keagamaan.

Konfigurasi kebijakan yang dihasilkan dari dualisme ini menempatkan pendidikan Islam dalam posisi yang khas, yakni diakui secara formal dalam sistem pendidikan nasional, namun tetap berada dalam kerangka tata kelola yang terpisah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi yuridis pendidikan Islam tidak selalu berbanding lurus dengan integrasi struktural dan kesetaraan kebijakan. Akibatnya, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam koordinasi kebijakan, standarisasi mutu, serta distribusi sumber daya pendidikan.

Dengan demikian, dualisme kelembagaan merupakan fenomena kebijakan yang mencerminkan dinamika politik pendidikan, bukan sekadar persoalan teknis administrasi. Pemahaman terhadap dualisme pendidikan perlu ditempatkan dalam kerangka historis, ideologis, dan politik agar dapat dirumuskan kebijakan yang lebih integratif dan berkeadilan.

**Dualisme daan Dikotomi Keilmuan**

Persoalan dualisme pendidikan juga berkaitan erat dengan dikotomi keilmuan. Muhaimin menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama pendidikan Islam modern adalah mengatasi pemisahan konseptual antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan Islam idealnya membangun paradigma integratif yang menempatkan seluruh ilmu dalam kerangka tauhid.

Namun, pemisahan kelembagaan berpotensi memperkuat sekat epistemologis. Pendidikan umum sering diidentikkan dengan rasionalitas modern, sementara pendidikan Islam diasosiasikan dengan studi keagamaan. Dikotomi ini tidak hanya berdampak pada struktur kurikulum, tetapi juga membentuk persepsi sosial terhadap pendidikan Islam. (Muhaimin, 2002)

Abuddin Nata menegaskan bahwa pendidikan Islam sesungguhnya memiliki orientasi holistik, mencakup dimensi spiritual, intelektual, dan moral. Oleh karena itu, dikotomi keilmuan bukanlah karakter inheren pendidikan Islam, melainkan konstruksi historis dan kebijakan. Tantangan kebijakan pendidikan Islam, dengan demikian, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga konseptual dan filosofis. (Nata, 2010)

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dualisme pendidikan di Indonesia tidak hanya berimplikasi pada aspek kelembagaan, tetapi juga berkontribusi terhadap munculnya dikotomi keilmuan. Pemisahan struktural antara pendidikan umum dan pendidikan Islam berpotensi memperkuat sekat epistemologis yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Kondisi ini menciptakan kecenderungan untuk memandang kedua ranah ilmu tersebut secara terpisah, baik dalam perumusan kurikulum maupun dalam persepsi sosial.

Padahal, secara konseptual, pendidikan Islam memiliki paradigma integratif yang menempatkan seluruh ilmu dalam kerangka tauhid dan memandang perkembangan intelektual, spiritual, serta moral sebagai satu kesatuan yang utuh. Dikotomi keilmuan, dengan demikian, bukan merupakan karakter inheren pendidikan Islam, melainkan hasil konstruksi historis dan kebijakan pendidikan yang berkembang dalam sistem nasional. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi pendidikan Islam tidak terbatas pada dimensi administratif, tetapi juga mencakup tantangan konseptual dan filosofis yang memerlukan rekonstruksi paradigma pendidikan.

**Dimensi Anggaran dan Tata Kelola Pendidikan**

Kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi politik, khususnya distribusi anggaran. Kebijakan anggaran mencerminkan prioritas politik negara dalam pembangunan

pendidikan. Dalam sistem dualisme, pengelolaan sumber daya keuangan berada dalam mekanisme birokrasi yang berbeda, sehingga berpotensi memunculkan ketimpangan dukungan kelembagaan.

Anggaran pendidikan bukan sekadar persoalan teknis keuangan, tetapi juga mencerminkan keberpihakan kebijakan. Ketika terdapat perbedaan struktur kelembagaan, koordinasi kebijakan anggaran menjadi isu strategis. Hal ini dapat memengaruhi pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, serta inovasi pembelajaran dalam pendidikan Islam. (Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan anggaran pendidikan merupakan elemen strategis dalam politik pendidikan karena mencerminkan prioritas dan keberpihakan negara dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks dualisme kelembagaan, perbedaan mekanisme birokrasi dalam pengelolaan sumber daya keuangan berpotensi menimbulkan ketimpangan dukungan terhadap lembaga pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan anggaran tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan memiliki dimensi politik yang signifikan.

Ketidaksinkronan atau perbedaan orientasi dalam kebijakan anggaran dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan, terutama dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi pendidik, serta inovasi pembelajaran. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan memerlukan koordinasi kebijakan yang adil, proporsional, dan terintegrasi agar tidak memperkuat disparitas struktural dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, aspek ekonomi politik menjadi faktor penting dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

**Persepsi Sosial terhadap Pendidikan Islam**

Dualisme kelembagaan turut membentuk konstruksi sosial mengenai pendidikan Islam. Pendidikan Islam kerap dipersepsikan sebagai pendidikan keagamaan semata, bukan sebagai institusi akademik yang setara dengan pendidikan umum. Persepsi ini tidak sepenuhnya bersumber dari kualitas internal lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kebijakan dan wacana publik. (Zamroni, 2001)

Azra menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam historisnya memiliki peran strategis dalam transformasi sosial dan budaya. Oleh karena itu, pendidikan Islam seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Tantangan kebijakan terletak pada bagaimana negara membangun paradigma kesetaraan tanpa menghilangkan kekhasan identitas pendidikan Islam.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dualisme kelembagaan pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek struktural, tetapi juga memengaruhi konstruksi sosial terhadap pendidikan Islam. Persepsi yang menempatkan pendidikan Islam semata-mata sebagai pendidikan keagamaan menunjukkan adanya pengaruh kuat dari kebijakan, tata kelola kelembagaan, serta wacana publik yang berkembang dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, citra pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan kebijakan yang membingkainya.

Secara historis, pendidikan Islam memiliki kontribusi signifikan dalam proses transformasi sosial, budaya, dan intelektual masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Islam semestinya diposisikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang memiliki legitimasi akademik dan sosial yang setara. Tantangan kebijakan pendidikan ke depan terletak pada upaya membangun paradigma kesetaraan dan integrasi tanpa menghilangkan karakteristik serta identitas khas pendidikan Islam. Hal ini menuntut formulasi kebijakan yang tidak hanya adil secara administratif, tetapi juga sensitif terhadap dimensi sosial dan kultural pendidikan.

**Rekonstruksi Paradigma Kebijakan Pendidikan**

Dualisme pendidikan pada dasarnya tidak harus dipahami sebagai persoalan dikotomis, melainkan sebagai tantangan kebijakan yang memerlukan pendekatan integratif. Nugroho menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus berorientasi pada keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Dalam konteks pendidikan, paradigma integratif diperlukan untuk memastikan harmonisasi standar mutu dan pemerataan dukungan kelembagaan.

Rekonstruksi kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada penguatan koordinasi antar kelembagaan, integrasi paradigma keilmuan, serta kesetaraan mutu. Pendekatan ini bukan untuk menghapus diferensiasi kelembagaan, tetapi untuk mengurangi potensi fragmentasi kebijakan dan persepsi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dualisme pendidikan tidak semestinya dipandang sebagai pertentangan yang bersifat dikotomis, melainkan sebagai realitas kebijakan yang menuntut pendekatan integratif dan strategis. Dualisme kelembagaan dapat tetap dipertahankan sepanjang tidak menimbulkan fragmentasi kebijakan, disparitas mutu, maupun ketimpangan dukungan terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menjamin prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan.

Rekonstruksi kebijakan pendidikan Islam menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat harmonisasi sistem pendidikan nasional. Penguatan koordinasi antar kelembagaan, integrasi paradigma keilmuan, serta kesetaraan standar mutu merupakan langkah strategis guna mengurangi sekat struktural dan perseptual yang selama ini berkembang. Pendekatan integratif tersebut tidak bertujuan menghapus diferensiasi kelembagaan, tetapi memastikan bahwa keberagaman struktur pengelolaan tidak menghambat kualitas, relevansi, dan kontribusi pendidikan Islam dalam pembangunan nasional

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika sejarah, struktur politik, serta konstruksi kebijakan publik yang berkembang dalam sistem pendidikan nasional. Dualisme pendidikan yang berlangsung hingga saat ini memiliki akar historis sejak masa kolonial, ketika pendidikan modern Barat berkembang terpisah dari lembaga pendidikan Islam tradisional. Warisan historis tersebut kemudian mengalami institusionalisasi pasca kemerdekaan melalui pembagian kewenangan kelembagaan antara pengelolaan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Dalam perspektif politik pendidikan, dualisme kelembagaan tidak sekadar mencerminkan pembagian administratif, tetapi juga menggambarkan kompromi ideologis negara dalam mengakomodasi modernisasi pendidikan sekaligus aspirasi religius masyarakat. Konfigurasi kebijakan ini menempatkan pendidikan Islam dalam posisi yang unik: diakui secara formal dalam sistem nasional, namun menghadapi tantangan struktural dalam koordinasi kebijakan, standarisasi mutu, serta distribusi sumber daya.

Dualisme tersebut juga berimplikasi pada dimensi konseptual, terutama terkait dikotomi keilmuan. Pemisahan kelembagaan berpotensi memperkuat persepsi yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, padahal secara filosofis pendidikan Islam memiliki paradigma integratif dan holistik. Selain itu, dalam aspek ekonomi politik, perbedaan mekanisme birokrasi berpotensi memunculkan ketimpangan dukungan anggaran, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas infrastruktur, pengembangan tenaga pendidik, dan inovasi pembelajaran.

Di sisi lain, dualisme kelembagaan turut membentuk konstruksi sosial terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam kerap dipersepsikan sebagai institusi keagamaan semata, bukan sebagai bagian integral dari sistem akademik nasional. Padahal, secara historis dan sosiologis, pendidikan Islam memiliki kontribusi strategis dalam pembangunan karakter, moral, dan transformasi sosial masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, dualisme pendidikan di Indonesia perlu dipahami secara proporsional, bukan sebagai pertentangan dikotomis, melainkan sebagai tantangan kebijakan yang menuntut pendekatan integratif, adil, dan visioner. Rekonstruksi kebijakan menjadi penting untuk memperkuat harmonisasi sistem pendidikan nasional tanpa menghilangkan kekhasan identitas pendidikan Islam.

### Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Pertama, diperlukan penguatan koordinasi kebijakan antar kelembagaan pendidikan guna mengurangi fragmentasi struktural yang berpotensi menghambat efektivitas tata kelola pendidikan nasional. Sinergi kebijakan menjadi penting terutama dalam penyusunan standar mutu, pengembangan kurikulum, serta perencanaan strategis pendidikan.

Kedua, negara perlu mendorong paradigma integratif dalam pengembangan keilmuan, sehingga dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum tidak semakin menguat. Pendidikan Islam perlu diposisikan sebagai institusi akademik yang memiliki peran strategis dalam pembangunan intelektual sekaligus pembentukan karakter.

Ketiga, dalam dimensi ekonomi politik, kebijakan anggaran pendidikan perlu dirancang secara lebih proporsional, transparan, dan berkeadilan agar seluruh lembaga pendidikan memperoleh dukungan yang setara sesuai kebutuhan dan kontribusinya. Ketimpangan sumber daya berpotensi memperlemah kualitas pendidikan dan memperkuat kesenjangan kelembagaan.

Keempat, penting bagi negara dan pemangku kebijakan untuk membangun wacana publik yang lebih konstruktif mengenai pendidikan Islam. Pendidikan Islam perlu dipahami sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki legitimasi akademik, sosial, dan kultural.

Akhirnya, rekonstruksi kebijakan pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga konseptual, filosofis, dan sosiologis. Kebijakan yang integratif dan berkeadilan diharapkan mampu memperkuat peran pendidikan Islam dalam kerangka pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan

## REFERENCES


Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III.* Jakarta: Kencana.

Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III.* Jakarta: Kencana.

Effendy, B. (2003). *slam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia.* Jakarta: Paramadina.

Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia.* Princeton: Princeton University Press.

*Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* . (2023). E-ISSN : 2686-2387 P-ISSN : 1907-8285.

Maksum. (1999). *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Muhaimin. (2002). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nata, A. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Kencana.

Nugroho, R. (2008). *Public Policy.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern.* Jakarta: LP3ES.

Tilaar, H. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural.* Jakarta: Rineka Cipta.

Tilaar, H. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan.* Jakarta: Rineka Cipta.

*Undang-Undang Republik Indonesia.* (Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Zamroni. (2001). *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi.* Yogyakarta: Bigraf Publishing.